



PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG

bkpsdm JOMBANG
SANTRI

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang merupakan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun dalam lima tahunan, dan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkup organisasi perangkat daerah selama periode satu tahun, serta sebagai wujud terselenggaranya fungsi manajemen yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam perjalanannya, Rencana Kerja tahunan yang telah disusun perlu dilakukan perubahan dengan adanya perubahan kebijakan, baik kebijakan level pusat, provinsi maupun kabupaten, isu yang berkembang dan permasalahan yang ada. guna sehingga dapat mendukung terselenggaranya tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan

keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada Perubahan Rencana Kerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk merumuskan sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana, dan indikator kinerja dari masing-masing satuan kerja dalam rangka mewujudkan kinerja pengawasan yang transparan, efektif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berharap Perubahan Renja Tahun 2023 yang telah tersusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh ASN di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Partisipatif yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

Jombang, 3 Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196709041992021002

**DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV : PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang menjelaskan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–PD) sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah”.

Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di daerah dalam waktu lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun isi dari Renstra PD tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) adalah Renstra PD memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra).

Rencana kerja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra PD.

Renja BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang telah disusun perlu dilakukan penyesuaian, mengingat adanya perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 serta mendasar pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama enam bulan terakhir yang menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, terutama adanya beberapa kebijakan pusat yang baru dikeluarkan, diantaranya kebijakan terkait pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hanya dikhususkan untuk formasi guru yang berdampak pada tidak terlaksananya pengadaan pegawai sesuai rencana, peraturan berkaitan dengan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan peraturan berkaitan dengan Disiplin Pegawai yang pelaksanaannya belum optimal karena minimnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan ASN Kabupaten akan aturan dimaksud, serta kebijakan daerah berkaitan dengan pencapaian Indeks SPBE yang menjadi indikator Kepala Daerah (IKD) serta pengisian kekosongan pejabat diluar prediksi dikarenakan meninggal dunia. Perubahan Renja Tahun 2023 ini sebagai upaya pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh BKPSDM sepanjang tahun 2023.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya

bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional sebagaimana nilai dasar atau *core value* ASN “BERAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif dan Kolaboratif yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

1.2 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang;
- r) Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 29 Mei 2023 Nomor:050/371/415.01/2023 Hal:Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan lingkup BKPSDM Kabupaten Jombang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan, terarah dan terukur guna mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Dan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Perubahan Program dan kegiatan
- 3.4. Form Lampiran 3

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II pada umumnya telah dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 meskipun ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana karena harus menunggu kebijakan dari pusat serta jadwal dari BKN Kanreg Jawa Timur serta BPSDM Jatim sebagai mitra kerja BKPSDM.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1. matriks capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sampai dengan triwulan II yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari program ini adalah Terpenuhinya perencanaan, pelayanan, dan pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang mempunyai indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur target 91%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 50% dengan tingkat capaian sebesar 54.95%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,341,756,445.00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3,340,882,480,00 atau 45.51%.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 55.56% dengan tingkat capaian sebesar 55.56%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,922,500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4,735,000,00 atau 26.42%.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 4 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebanyak 2 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,346,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 3,295,000.00 atau 21.47%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 5 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 laporan dengan tingkat capaian sebesar 60%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,576,500.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 1,440,000.00 atau 55.89%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu dengan target 98%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 50% dengan tingkat capaian sebesar 50%. Indikator yang kedua adalah Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan dengan target 100% Dari target tersebut terealisasi sebesar 50% dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,454,534,415,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3,030,580,891,00 atau 46.95%.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 53 orang/bulan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 44 orang/bulan dengan tingkat capaian sebesar 46%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.,284,031,415,00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 2,943,946,891,00 atau 46%.
 - Pelaksanaan Penataan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 4 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 2 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166,998,00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 84,639,000,00 atau 50%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 3 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,058,500.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 915,000,00 atau 86.44%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target sebanyak 16 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 8 laporan dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.446.500,00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 1,080,000,00 atau 44.14%.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Pelaporan Aset Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 100% dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410,500.00 belum ada realisasi namun dalam pengajuan SPJ.
 - Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 1 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 1 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.500,00 belum ada realisasi, namun dalam tahap pengajuan SPJ.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 62.07% dengan tingkat capaian sebesar 62.07%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 379,018,700.00 dan telah terealisasi Rp. 135,044,950.00 atau 35.3%.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 jenis. Dari target tersebut terealisasi sebesar 1 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,000,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 1,681,000.00 atau 42.03%.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 5 paket. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 paket dengan tingkat capaian sebesar 60%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,513,800.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 18,070,500.00 atau 31.42%.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi dengan target 3 paket. Dari target tersebut terealisasi sebesar 0 paket dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,480,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi terealisasi.

- Penyediaan Bahan Logistik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143,110,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 29,903,000.00 atau 20.90%.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket. Dari target tersebut terealisasi sebesar 2 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83,012,700.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 45,448,85.00 atau 54.75%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 3 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 4.906.200,00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 1.520.000,00 atau 30.98%.

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 6 laporan dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84,995,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 38,421,600.00 atau 45.20%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,848,340.00 dan terealisasi sebesar Rp. 50,100,000.00 atau 82.34%.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target 3 unit. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 unit dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,848,340.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 50,100,000.00 atau 82.34%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 54.55% dokumen dengan tingkat capaian sebesar 54.55%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241,698,590.00 dan terealisasi sebesar Rp. 104,594,839.00 atau 43.27%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 30 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 15 laporan dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101,658,590.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 44,797,307.00 atau 44.07%.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 3 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140,000,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 59,797,532.00 atau 42.70%.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dengan target 95%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 52.53% dokumen dengan tingkat capaian sebesar 55.3%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187,323,400.00 dan terealisasi sebesar Rp. 15,826,800,00 atau 8.45%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 1 unit. Dari target tersebut belum terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,010,000.00 sampai dengan tribulan II belum terealisasi.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 26 unit. Dari target tersebut terealisasi sebesar 8 unit dengan tingkat capaian sebesar 30.77%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109,643,400.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 7,866,800.00 atau 7.17%.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 72 unit. Dari target tersebut terealisasi sebesar 44 unit dengan tingkat capaian sebesar 61.11%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36,670,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 7,960,000.00 atau 21.71%.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program ini mempunyai Indikator Indeks kualitas ASN dengan target nilai 0.86. Dari target tersebut belum teralisasi karena nilai baru keluar pada tribulan IV dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,615,991,300.00 dan terealisasi sebesar Rp. 473,765,397.00 atau 18.11%.

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan. dengan target 82%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 35.83% dengan tingkat capaian sebesar 43.7%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,529,935,100.00 dan terealisasi sebesar Rp. 130,236,724.00 atau 8.51%.

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37,789,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 5,276,198.00 atau 13.96%.

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan target 1 dokumen. Dari target tersebut belum terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,149,555,900.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 73,003,994.00 atau 6.35%.

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target 595 SK. Dari target tersebut terealisasi sebesar 314 SK dengan tingkat capaian sebesar 52.77%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214,082,500.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 49,844,032.00 atau 23.28%.

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 1 dokumen.

Dari target tersebut belum teralisasi karena direncanakan baru pada tribulan III dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128,507,700.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 2,112,500.00 atau 1.64%.

b. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat dengan target 86%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 74.24% dengan tingkat capaian sebesar 86.34%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 684,886,400.00 dan terealisasi sebesar Rp. 253,202,500.00 atau 36.97%.

- Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan target 168 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 95 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 56.54%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195,350,200.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 14,897,500.00 atau 7.63%.

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 5,208 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3,448 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 66.20%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157,837,600.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 65,337,500.00 atau 41.40%.

- Pengelolaan Promosi ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN dengan target 3 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 3 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 331,698,600.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 172,967,500.00 atau 52.15%.

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi dengan target 90%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 81.61% dengan tingkat capaian sebesar 90.68%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144,280,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 21,051,651.00 atau 14.59%.

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan dengan target 72 orang. Dari target tersebut terealisasi sebesar 70 orang dengan tingkat capaian sebesar 97.22%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93,676,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 6,361,651.00 atau 6.79%.
 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir dengan target 400 orang. Dari target tersebut terealisasi sebesar 264 orang dengan tingkat capaian sebesar 66%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50,604,000.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 14,690,000.00 atau 29.03%.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dan Persentase ASN yang memperoleh penghargaan dengan target masing-masing 0.2% dan 0%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 0.2% dan 0% dengan tingkat capaian sebesar 100% dan 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256,889,800.00 dan terealisasi sebesar Rp. 69,274,522.00 atau 26.97%.
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan target 8,563 dokumen. Dari target tersebut terealisasi sebesar 5,519 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 76.80%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49,273,500.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 20,346,450.00 atau 41.29%.
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan dengan target 1,332 orang. Dari target tersebut terealisasi sebesar 1,833 orang dengan tingkat capaian sebesar 138%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175,366,800.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 32,117,250.00 atau 18.31%.
 - Pembinaan Disiplin ASN
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan dengan target 16 orang. Dari target tersebut

teralisasi sebesar 16 orang dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,249,500.00 sampai dengan tribulan II teralisasi sebesar Rp. 16,810,822.00 atau 52.13%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini mempunyai Indikator Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN dengan target nilai 20. Dari target tersebut teralisasi sebesar 0 karena baru bias dihitung pada tribulan IV dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,896,799,400.00 dan teralisasi sebesar Rp. 868,215,994.00 atau 29.97%.

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dengan target 100%. Dari target tersebut teralisasi sebesar 13.8% dengan tingkat capaian sebesar 13.8%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 592,117,400.00 sampai dengan tribulan II teralisasi sebesar Rp. 72,786,572.00 atau 12.29%.

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan target 201 orang. Dari target tersebut teralisasi sebesar 31 orang dengan tingkat capaian sebesar 13.43%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 566,024,600.00 sampai dengan tribulan II teralisasi sebesar Rp. 65,868,472.00 atau 11.64%.

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil dengan target 2 dokumen. Dari target tersebut teralisasi sebesar 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 50%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26,092,800.00 sampai dengan tribulan II teralisasi sebesar Rp. 6,918,100.00 atau 26.51%.

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial dengan target 100%. Dari target tersebut terealisasi sebesar 2.82% dengan tingkat capaian sebesar 2.82%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,304,682,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 795,429,422.00 atau 34.51%.

- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota dengan target 265 orang. Dari target tersebut belum terealisasi karena baru dilaksanakan pada tribulan II dengan tingkat capaian sebesar 0%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 673,531,000.00 terealisasi Rp. 14,876,500.00 atau 2.21%.

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 4 laporan. Dari target tersebut terealisasi sebanyak 3 laporan dengan tingkat capaian sebesar 75%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,290,690,500.00 sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 780,552,922.00 atau 60.48%.

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama dengan target 50 dokumen. Dari target tersebut terealisasi 6 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 12%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340,460,500.00 belum terealisasi atau 0%.

Tabel 2.1

Matriks Capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (30 Juni sesuai SPD)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									12.884.030.145			4.862.863.871
5.03	KEPEGAWAIAN									9.957.747.745			3.814.647.877
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	91	%	100.48	%	91	%	7.341.756.445	50	%	3.340.882.480	
5.03.01.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	%	110	%	100	%	17.922.500	55,55	%	4.735.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	9	dokumen	4	dokumen	15.346.000	2	dokumen	3.295.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	20	dokumen	5	dokumen	2.576.500	3	dokumen	1.440.000	
5.03.01.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98	%	100	%	98	%	6.454.534.415	50	%	3.030.580.891	
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%		50	%		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/bulan	28	kali	53	Orang/bulan	6.284.031.415	42	Orang/bulan	2.943.946.891	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	24	Kali	4	Dokumen	166.998.000	2	Dokumen	84.639.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5	dokumen	3	Laporan	1.058.900	3	Laporan	915.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran PD	16	Laporan	21	dokumen	16	Laporan	2.446.500	8	Laporan	1.080.000	
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%	410.500	100	%		
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun	1	Laporan	6	Dokumen	1	Laporan	410.500	1	Laporan		
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	%	0	%	0	%	-	0	%		
5.03.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	54	stel	0	stel	0	stel	-	0	stel		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	379.018.700	50	%	135.044.950	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (30 Juni sesuai SPD)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8	jenis	1	paket	4.000.000	1	paket	1.681.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	7	jenis	5	Paket	57.513.800	3	Paket	18.070.500	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3	Paket	12	jenis	3	Paket	1.480.000	0	Paket	-	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	22	kali	3	Paket	143.110.000	3	Paket	29.903.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	469	buku	2	Paket	83.013.700	2	Paket	45.448.850	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	6	jenis	3	Dokumen	4.906.200	3	Dokumen	1.520.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	24	bulan	12	Laporan	84.995.000	6	Laporan	38.421.600	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	100	%	100	%	60.848.340	50	%	50.100.000	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	39	Unit	3	Unit	60.848.340	3	Unit	50.100.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	91,66	%	100	%	241.698.500	54,55	%	104.594.839	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	Laporan	24	bulan	30	Laporan	101.658.590	15	Laporan	44.797.307	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	7	jenis	3	Laporan	140.040.000	3	Laporan	59.797.532	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95	%	95	%	95	%	124.015.200	52,53	%	15.826.800	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	41.010.000	0	unit	-	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	29	unit	26	unit	109.643.400	8	unit	7.866.800	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	2	unit	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	72	unit	152	Jenis	72	unit	36.670.000	44	Unit	7.960.000	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (30 Juni sesuai SPD)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,85		0,81		0,85		2.615.991.300	0	%	473.765.397	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	81	%	131	%	81	%	1.529.935.100	35,83	%	130.236.724	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	37.789.000	1	dokumen	5.276.198	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	6	Kegiatan	1	Dokumen	1.149.555.900	1	Dokumen	73.003.994	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595	Dokumen	1170	SK	595	Dokumen	214.082.500	314	Dokumen	49.844.032	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokumen	2	modul	1	Dokumen	121.972.000	0	Dokumen	2.112.500	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	86	%	89,62	%	86	%	684.886.400	74,25	%	253.202.500	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168	Dokumen	55	surat	168	Dokumen	195.350.200	95	Dokumen	14.897.500	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5208	Dokumen	9841	SK	5208	Dokumen	195.350.200	3448	Dokumen	65.337.500	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	331.698.600	3	dokumen	172.967.500	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	87	%	91,85	%	87	%	144.280.000	81,61	%	21.051.651	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72	orang	359	orang	72	orang	93.676.000	70	orang	6.361.651	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	1393	SK	400	Orang	50.604.000	264	Orang	14.690.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	0,2	%	0,35	%	0,2	%	256.889.800	0,2	%	69.274.522	
		2. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	98	%	98	%	98	%					
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563	Dokumen	15865	SKP	8563	Dokumen	49.273.500	5519	Dokumen	20.346.450	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332	Orang	4341	surat	1332	orang	175.366.800	1833	orang	32.117.250	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16	orang	38	orang	16	orang	32.249.500	16	orang	16.810.822	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (30 Juni sesuai SPD)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												868.215.994
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20		17,74		20		2.896.799.400	0			868.215.994
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100	%	125.08	%	100	%	592.117.400	13,84	%		72.786.572
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	201	orang	1061	orang	201	orang	566.024.600	31	orang		65.868.472
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	Dokumen	290	orang	2	Dokumen	26.092.800	1	Dokumen		6.918.100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	100,44	%	100	%	2.304.682.000	2,82	%		795.429.422
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265	orang	533	orang	265	orang	673.531.000	0	Orang		14.876.500
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	Laporan	64	orang	4	Laporan	1.290.690.500	3	Laporan		780.552.922
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50	Dokumen	547	orang	50	Dokumen	340.460.500	6	Dokumen		340.460.500

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2019-2023 kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan. Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	-	-	98%	98%	-	-	-	98.23	99.45	-	-	-
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi	-	-	81%	82%	-	-	-	89	NA	-	-	-
3.	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	-	-	95%	96%	-	-	-	99.05	100	-	-	-
4.	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	-	-	91%	92%	-	-	-	77.64	80.18	-	-	-
5.	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	-	-	-	-	80%	81%	82%	-	-	80%	131%	-
6.	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	-	-	-	-	82%	84%	86%	-	-	82%	82,36 %	-
7.	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	-	-	85%	87%	90%	-	-	85%	83,70 %	-
8.	Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	-	-	-	-	0.2%	0.2%	0.2%	-	-	0.2%	0,35 %	-
9.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	-	-	-	-	98%	98%	98%	-	-	98%	98%	-
10.	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	150,17 %	-

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	97,05 %	-

Mendasar pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2019 – 2022 rata-rata baik, hal ini dapat dilihat dari capaian pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang melebihi target meskipun ada beberapa dibawah target.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka dapat ditentukan isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pencapaian kinerja pemerintah. Hal ini karena tingkat kedisiplinan ASN yang belum optimal terutama pemahaman tentang aturan disiplin ASN masih kurang sehingga kinerja pemerintah menjadi rendah;
- b. Perlunya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui validasi data SIASN karena Indeks Profesionalitas ASN masih rendah yang disebabkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN belum maksimal;
- c. Peningkatan Pelayanan kesejahteraan ASN. Hal ini karena masih terdapat layanan kesejahteraan ASN yang terlambat;
- d. Peningkatan kualitas kinerja dan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini karena kompetensi aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan sehingga kualitas kinerja dan kompetensi aparatur kurang optimal;
- e. Penerbitan SK pensiun tepat waktu. Hal ini karena usulan pensiun menggunakan aplikasi SIASN yang terkadang terjadi kendala adanya perbaikan sistem aplikasi serta gangguan jaringan koneksi internet;
- f. Sistem pengusulan dan penerbitan kenaikan pangkat berbasis paperless menggunakan aplikasi dan data yang akurat dalam SIAP ASN;
- g. Otomatisasi pencetakan surat kenaikan gaji berkala yang lebih user friendly;
- h. Mengoptimalkan penempatan PNS yang merata dan pola pembinaan karir yang jelas serta sesuai dengan kompetensinya;
- i. Mengoptimalkan seleksi perekrutan ASN melalui peningkatan sarana dan prasarana terutama dalam hal ketersediaan gedung dan prasarana CAT,

- mengingat penggunaan metode CAT semakin meluas yakni untuk rekrutmen Calon ASN, Assesment tes, Job Fit, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
- j. Penambahan fitur layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam SIAP ASN. Hal ini karena belum semua layanan dimaksud terfasilitasi dalam aplikasi SIAP ASN serta integrase data dengan SIASN.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, beberapa diantaranya untuk mengakomodasi masukan-masukan dari stakeholder yang dalam hal ini adalah ASN dan Perangkat Daerah serta perubahan regulasi bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Diantara perubahan.

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 bersumber dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten. Sedangkan Perubahan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB

Untuk lebih menajamkan pemahaman visi dan misi RPJMN dan juga untuk lebih mendefinisikan nawa cita yang terkandung dalam visi dan misi tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berkepribadian, Bersih dan Kompeten Untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Kementerian PANRB, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses
3. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik
4. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
5. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
7. Meningkatnya penerapan system integritas
8. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan public
9. Meningkatnya kualitas pelayanan public
10. Terwujudnya Kem.PANRB yg efektif dan efisien
11. Terwujudnya Kem.PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
12. Terwujudnya pelayanan publik Kem.PANRB yang berkualitas

Sasaran dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, yang mana unsur yang terkandung didalamnya selaras dengan sasaran keempat, lima dan enam dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

2. BKN Pusat

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN, yaitu :

“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Dalam rangka mewujudkan misi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional.
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut : “Meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN”.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, yang mana unsur yang terkandung didalamnya selaras dengan sasaran BKN yaitu Meningkatkan tingkat profesionalisme pegawai ASN.

3. BKD Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis. Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis yaitu “Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah”.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan. Selain itu juga terbentuknya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disiplin, integritas,

mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi kerja yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Serta didukung dengan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
2. Meningkatnya kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat
4. Meningkatnya profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, yang mana unsur yang terkandung di dalamnya selaras dengan sasaran ke satu, dua dan tiga dari BKD Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur, Meningkatnya kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 (lima) atau tahun terakhir dari rangkaian pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**. Tema Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sektor**

Unggulan dengan empat prioritas pembangunan yang menjadi titik beratnya, salah satunya adalah:

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketentraman Dan Ketertiban Umum”

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian prioritas dimaksud melalui kebijakan **Peningkatan Inovasi dan Profesionalisme ASN** dengan indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN dan kebijakan ini menjadi sasaran Kepala Daerah guna pencapaian Visi dan Misi beliau.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan fungsi melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sehingga BKPSDM mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mendukung pencapaian program prioritas dimaksud dengan menjadikannya sebagai tujuan organisasi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian prioritas dimaksud melalui kebijakan **Peningkatan Profesionalisme ASN** dengan indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN dan kebijakan ini menjadi sasaran Kepala Daerah guna pencapaian Visi dan Misi beliau.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan fungsi melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sehingga BKPSDM mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mendukung pencapaian program prioritas dimaksud dengan menjadikannya sebagai tujuan organisasi.

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dokumen perubahan RPJMD dan Perubahan RKPD Kabupaten Jombang, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tujuan (1) **Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** dan (2) **Meningkatkan Profesionalitas Aparatur**. Kedua tujuan ini masih tetap sama tidak ada perubahan pada perubahan renja tahun 2023 ini.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran organisasi merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. **"Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah"**, dengan indikator **Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**.
2. **"Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN"**, dengan indikator, **Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit**.

Kedua sasaran diatas masih tetap sama pada perubahan renja tahun 2023 ini, hanya ada perubahan pada target kinerja pada sasaran kedua yaitu **Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN"**, dengan indikator, **Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit**, dimana pada renja tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 275 sudah terlampaui pada akhir tahun 2022 sebesar 295.5 sehingga perlu dilakukan perubahan dengan target baru menjadi 297.5

Untuk lebih memahami tujuan, sasaran beserta indikator Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	-	Indeks Reformasi Birokrasi	76
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81.05)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	-	Indeks Profesionalitas ASN	64
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297.5

3.3 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Rencana Kerja Tahun 2023, namun perubahan terjadi pada pagu indikatif dan target. Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan Kompetensi Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
 3. Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan

Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - b) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Mutasi ASN;
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 3. Pengelolaan Promosi ASN.
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 3. Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

4. Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 4. Penyediaan Bahan Logistik;
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Secara lebih rinci rencana Program, Kegiatan, indikator, target serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebagaimana pada Lampiran yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :



PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan									
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)															
							K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)		13=(11-7)		14	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								12.884.030.145			4.682.863.971			13.528.408.645			752.698.632						
5.03	KEPEGAWAIAN								9.957.747.745			3.814.647.977			10.497.305.473			627.113.860						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91	%	100,48	%	91	%	7.341.756.445	50	%	3.340.882.580	91	%	7.494.866.173	0	%	267.281.288						
5.03.01.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	%	110	%	100	%	17.922.500	55,56	%	4.735.000	100	%	8.774.000	0	%	(16.726.000)						
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	9	dokumen	4	dokumen	15.346.000	2	dokumen	3.295.000	3	dokumen	6.197.500	-1	dokumen	(10.302.500)						
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	20	dokumen	5	dokumen	2.576.500	3	dokumen	1.440.000	5	dokumen	2.576.500	0	dokumen	(6.423.500)						
5.03.01.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98	%	100	%	98	%	6.454.534.415	50	%	3.030.580.891	98	%	6.457.744.415	0	%	76.484.320						
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%		50	%		100	%		0	%	-						
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	orang/bulan	28	kali	53	orang/bulan	6.284.031.415	42	orang/bulan	2.943.946.891	44	orang/bulan	6.284.031.415	-9	orang/bulan	83.264.320						
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	24	kali	4	dokumen	166.998.000	2	dokumen	84.639.000	4	dokumen	171.528.000	0	dokumen	(5.460.000)						
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5	dokumen	3	laporan	1.058.900	3	laporan	915.000,00	3	laporan	1.058.500	0	laporan	-						
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	laporan	21	dokumen	16	laporan	2.446.500	8	laporan	1.080.000	16	laporan	1.126.500	0	laporan	(1.320.000)						



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan						
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%	410.500	100	%	-	100	%	200.000			(210.500)			
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Laporan	6	dokumen	1	Laporan	410.500	1	Laporan	0	1	Laporan	200.000	0	Laporan	(210.500)			
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.03.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	54	Stel	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	379.018.700	62,07	%	135.044.950	100	%	403.411.600	0	%	101.114.300			
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8	jenis	1	paket	4.000.000	1	paket	1.681.000	1	paket	5.008.000	0	paket	1.008.000			
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	7	jenis	5	paket	57.513.800	3	paket	18.070.500	5	paket	69.431.700	0	paket	(2.961.300)			
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3	paket	12	jenis	3	paket	1.480.000	-	paket	-	3	paket	1.480.000	0	paket	-			
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	22 24	kali bulan	3	paket	143.110.000	3	paket	29.903.000	3	paket	110.110.000	0	paket	(27.500.000)			
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	469 94.653	buku lembar	2	paket	83.013.700	2	paket	45.448.850	2	paket	83.481.700	0	paket	35.751.400			
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	6	jenis	3	dokumen	4.906.200	3	dokumen	1.520.000	3	dokumen	4.906.200	0	dokumen	1.909.200			
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	24	bulan	12	laporan	84.995.000	6	laporan	38.421.600	12	laporan	128.994.000	0	laporan	92.907.000			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	91,17	%	100	%	60.848.340	100	%	50.100.000	100	%	191.153.710	0	%	129.537.110			
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	39	unit	3	unit	60.848.340	3	unit	50.100.000	19	unit	191.153.710	16	unit	129.537.110			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan						
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	91,66	%	100	%	241.698.500	54,55	%	104.594.839	100	%	244.226.448	0	%	(1.461.142)			
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	laporan	24	bulan	30	laporan	101.658.590	15	laporan	44.797.307	37	laporan	101.811.448	7	laporan	152.858			
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	7	jenis	3	laporan	140.040.000	3	laporan	59.797.532	3	laporan	142.415.000	0	laporan	(1.614.000)			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95	%	100	%	95	%	124.015.200	52,53	%	15.826.800	95	%	189.556.000	0	%	(21.256.800)			
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	41.010.000	-	unit	0	1	unit	41.010.000	0	unit	(17.149.200)			
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	29	unit	26	unit	109.643.400	8	unit	7.866.800	26	unit	99.783.400	0	unit	(9.210.200)			
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	72	unit	152	jenis	72	unit	36.670.000	44	unit	7.960.000	71	unit	48.762.600	-1	unit	5.102.600			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,86		0,81		0,86		2.615.991.300			473.765.397	0,86		3.002.439.300	0		234.247.800			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan ASN	81	%	131	%	82	%	1.529.935.100	35,83	%	130.236.724	35	%	1.530.111.100	-47	%	(109.060.200)			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	37.789.000	1	dokumen	5.276.198	1	dokumen	28.757.000	0	dokumen	(10.898.000)			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	dokumen	6	kegiatan	1	dokumen	1.149.555.900	-	dokumen	73.003.994	1	dokumen	900.151.600	0	dokumen	(241.496.500)			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595	dokumen	1170	SK	595	dokumen	214.082.500	314	dokumen	49.844.032	575	dokumen	432.350.500	-20	dokumen	96.454.000			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	3	modul	1	dokumen	121.972.000	-	dokumen	2.112.500	1	dokumen	168.852.000	0	modul	46.880.300			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan				
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)											
							K	Rp.		K	Rp.							K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	86	%	89,62	%	86	%	684.886.400	74,25	%	253.202.500	86	%	907.203.900	0	%	180.953.700			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168	dokumen	55 505	surat SK	168	dokumen	195.350.200	95	dokumen	14.897.500	168	dokumen	196.166.800	0	dokumen	(17.673.800)			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5208	dokumen	9.841 187	SK orang	5208	dokumen	195.350.200	3448	dokumen	65.337.500	5192	dokumen	248.973.100	-16	dokumen	77.462.100			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	dokumen	4 11	dokumen kali	3	dokumen	331.698.600	3	dokumen	172.967.500	5	dokumen	462.064.000	2	dokumen	121.165.400			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	87	%	91,85	%	90	%	144.280.000	81,16	%	21.051.651	90	%	123.962.500	0	%	(20.317.500)			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72	orang	359	orang	72	orang	93.676.000	70	orang	6.361.651	71	orang	58.228.500	-1	orang	(35.447.500)			
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	1.393	SK	400	orang	50.604.000	264	orang	14.690.000	400	orang	65.734.000	0	orang	15.130.000			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.	0,2	%	0,35	%	0,2	%	256.889.800	0,2	%	69.274.522	0,4	%	441.161.800	0,2	%	182.671.800			
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	98	%	98	%	98	%			%		98	%		0	%	-			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563	dokumen	15.865	SKP	8563	dokumen	49.273.500	5519	dokumen	20.346.450	8563	dokumen	98.738.200	0	dokumen	48.007.700			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332	orang	4.341 6 36 24	surat % kegiatan orang	1332	orang	175.366.800	1833	orang	32.117.250	1332	orang	175.366.800	0	orang	(5.734.700)			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16	orang	38	orang	16	orang	32.249.500	16	orang	16.810.822	30	orang	167.056.800	14	orang	140.398.800			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											868.215.994			3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20		17,74		20		2.896.799.400			868.215.994	20		3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100	%	125,08	%	100	%	592.117.400	13,80	%	72.786.572	100	%	1.129.159.700	0	%	543.204.300			
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201	orang	1.061	orang	201	orang	566.024.600	31	orang	65.868.472	255	orang	1.118.128.100	54	orang	558.265.500			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan						
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
	Pemerintahan Umum																				
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	dokumen	290	orang	2	dokumen	26.092.800	1	dokumen	6.918.100	2	dokumen	11.031.600	0	dokumen	(15.061.200)			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	100,44	%	100	%	2.304.682.000	2,82	%	795.429.422	100	%	1.901.943.472	0	%	(417.619.528)			
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265	orang	533	orang	265	orang	673.531.000	-	orang	14.876.500	275	orang	677.489.500	10	orang	3.735.500			
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	laporan	64	orang	4	laporan	1.290.690.500	-	laporan	780.552.922	4	laporan	1.179.155.972	0	laporan	(122.915.528)			
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50	dokumen	547	orang	50	dokumen	340.460.500	3	dokumen	-	50	dokumen	45.298.000	0	dokumen	(298.439.500)			

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terarah, terukur dan terkendali guna pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Perubahan rencana kerja ini mengacu pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dan perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 serta mempertimbangkan kebijakan pusat dan kebijakan daerah serta hasil evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2023 sampai dengan tribulan II.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tidak terlepas dari peran serta dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Jombang, maka perlu adanya kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat daerah, khususnya ASN lingkup BKPSDM Kabupaten Jombang yang pada nantinya akan dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Jombang, 3 Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, S.E, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196709041992021002